



# Membuat Wisata Yogyakarta Sepi

## GKR Bendera Soroti Larangan Study Tour

**YOGYAKARTA, Joglo Jogja** - Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) GKR Bendera akui kebijakan larangan study tour oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak signifikan pada angka kunjungan wisatawan ke Yogyakarta. Ini karena salah satu segmen kunjungan wisata adalah anak sekolah.

■ Baca **MEMBUAT...** Hal II



DWI AGUS/JOGLO JOGJA  
**KONSISTEN:** Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) GKR Bendera saat ditemui di Kagungan Dalem Museum Wahanarata, Minggu (27/7/2025).

# Membuat Wisata Yogyakarta Sepi

sambungan dari hal Joglo Jogja

Diketahui kebijakan ini dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pelarangan *study tour* menasar sekolah-sekolah di wilayah provinsi Jawa Barat. Termasuk dengan tujuan destinasi wisata di DIY.

"Jadi, larangan di Jawa Barat itu berdampak, karena di Jogja banyak sekali mendapatkan benefit dari *study tour*," jelasnya saat difemui di Kagungan Dalem Museum Wahanarata, Minggu (27/7/2025).

Bendara menuturkan, kondisi ini akan berdampak lama jika tak ada solusi.

Hanya saja, dia optimis jika pelaku wisata di Yogyakarta bisa bertahan. Termasuk, dengan melakukan inovasi dalam menggaet wisatawan.

Dalam beberapa pertemuan, Bendera meminta pelaku wisata melihat celah. Dalam artian, potensi kunjungan wisata dari daerah lainnya. Ini karena kebijakan larangan *study tour* hanya berlaku dari sejumlah daerah.

"Kemarin sudah diskusi dan

optimis tetap bisa bertahan. Tentu Jogja tidak pernah diam karena selalu berinovasi. Melakukan adaptasi agar tetap bisa *survive*. Entah dengan tawaran destinasi atau mencari pasar lainnya," katanya.

Disatu sisi, Bendera memastikan iklim wisata di Yogyakarta tetap positif. Adanya isu kebijakan daerah hingga pemerintah pusat tidak serta merta mematikan langkah ekonomi. Kunjungan wisata perlahan mengalami tren baik setiap waktunya.

"Sudah mulai membaik dengan adanya aktivitas dan sudah positif. Setidaknya lebih baik dari awal tahun. Harapannya punya *event* yang bisa tingkatkan okupansi," ujarnya.

Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM) Barat Dardiri akui keberatan atas kebijakan Dedi Mulyadi. Dia menyebut angka kunjungan wisata ke kawasan Merapi menurun drastis. Kondisi ini tentu berdampak signifikan terhadap jasa jip wisata.

Sebagai langkah protes, beberapa perwakilan AJWLM berangkat ke Jawa Barat. Tujuannya untuk mengikuti aksi pencabutan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Study Tour. Harapannya agar iklim wisata di wilayah Merapi kembali normal.

"Sangat terdampak sekali, 65 persen *lah*, dampaknya penurunan saat ini. Sudah terasa sejak mulai dilarang untuk studi tour itu. Itulah mengapa 150 teman pelaku wisata kemarin ikut berangkat ke Jawa Barat untuk ikut aksi," katanya.

Musim liburan yang biasa menjadi masa panen juga tertunduk. Dardiri menyebut kondisi ini dirasakan oleh seluruh komunitas armada. Adapun angka kunjungan tertinggi didominasi dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Padahal musim liburan adalah ajang berkah bagi pelaku wisata Merapi. Kondisi ini, lanjutnya, membuat pelaku wisata gigit jari. Adapun munculnya keramaian hanya pada akhir pekan semata.

"Kemarin selama *long weekend* itu lumayan ada dari Jateng, Jatim, tapi ya tidak seramai dulu. Biasanya liburan itu penuh, sampai anak-anak mulai sekolah itu biasanya penuh. Saat ini ya enggak, cuma mengandalkan Jateng dan Jatim," ujarnya.

Dardiri meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang. Terkait larangan bisa dievaluasi bersama-sama. Terutama, untuk faktor kelayakan armada *study tour*. Setiap panitia penyelenggara wajib menggunakan perusahaan otobus yang tersertifikasi.

Secara tegas dia bahkan meminta agar SK tersebut dicabut. Ini karena menurutnya lebih banyak kerugian dibandingkan sisi positifnya. Terutama untuk sektor wisata yang menjadi tujuan kunjungan.

"Minta agar SK itu dikaji lagi, semoga dicabut karena dampak banyak. Solusi keamanan, bus wajib diperiksa sebelum berangkat. Kalau dari kami (AJWLM), rutin cek armada layak dan aman untuk wisata," katanya. (dwi/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005